

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Penelitian yang penulis lakukan berhasil menjawab rumusan masalah yang dipermasalahkan di awal penulisan ini, yakni tentang bagaimana efektifitas kerjasama keamanan Malacca Strait Patrol (MSP) dalam upaya mengatasi pembajakan dan perampokan bersenjata terhadap kapal di perairan Selat Malaka pada tahun 2009 hingga 2014. Pada penelitian ini telah dijabarkan berdasarkan indikator-indikator yang dapat menilai efektivitas Malacca Strait Sea Patrol (MSSP) atau patroli air, Eye in the Sky (EIS) atau patroli udara, dan Intelligence Exchange Group (IEG) yang dijalin oleh Indonesia-Malaysia-Singapura-Thailand untuk mengamankan jalur perdagangan Selat Malaka dari serangan pembajakan dan perampokan bersenjata terhadap kapal.

Kerjasama keamanan MSP dibentuk sebagai inisiatif dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand (bergabung pada tanggal 2008) sejak tahun 2004. Faktor pendorong kerjasama keamanan ini terbentuk dikarenakan adanya tekanan dunia internasional untuk terjaminnya keamanan jalur perdagangan Selat Malaka bagi kapal-kapal untuk melewati dari serangan pembajakan dan perampokan bersenjata terhadap kapal, kapal dari *litoral states* maupun *user states*. Selain itu keamanan perairan Selat Malaka merupakan tanggung jawab penuh pada masing-masing *litoral states* atas keamanan perairan yang berada di bawah masing-masing wilayah kedaulatannya seperti yang telah diatur dalam UNCLOS.

Dalam menyimpulkan jawaban atas rumusan masalah mengenai efektivitas kerjasama keamanan MSP, penulis menggunakan beberapa indikator-indikator untuk menilai keefektifitasannya. Penulis membagi indikator menjadi tiga kategori, yakni: indikator pendekatan sumber atau *input*, indikator pendekatan proses, dan indikator pendekatan sasaran atau *output* dalam bingkai teori neoliberal institusional.

Efektivitas kerjasama keamanan MSP dalam pendekatan sumber atau *input* dapat diambil kesimpulan bahwa meskipun masih ada beberapa kekurangan dari beberapa indikatornya, akan tetapi masih efektif menekan angka kejahatan maritim yang terjadi di Selat Malaka, salah satunya tindak kejahatan pembajakan dan perampokan bersenjata terhadap kapal. Kesiapan sarana prasarana seperti alutsista dan menara radar serta sumber daya manusia atau personil yang dimiliki Koarmabar sebagai aktor utama di Indonesia dalam kerjasama tersebut, dinilai masih kurang memenuhi yang sumber daya yang dibutuhkan dari segi kuantitas maupun kualitas dalam pelaksanaan rangkaian program Malacca Strait Patrol. Akan tetapi sesuai dengan teori neoliberal institusional, dengan adanya kerjasama seperti kerjasama keamanan MSP dapat saling menutupi kekurangan sarana prasarana dan SDM atau personil pada setiap *litoral states* untuk mengamankan Selat Malaka Selain itu dalam melakukan keterbukaan informasi sudah diatur secara detail dalam SOP Intelligence Exchange Group (IEG). Meskipun ada beberapa hal umum terjadi yakni militer masih ada beberapa hal yang masih harus disaring dalam keterbukaan informasi yang dinilai masih mampu ditangani oleh militer masing-masing, akan tetapi informasi yang dinilai perlu dan dibutuhkan *litoral states* lain akan

terlaporkan dalam Malacca Strait Patrol Information System (MSP-IS) yang membuat arus informasi menjadi lebih efektif.

Efektivitas kerjasama keamanan MSP dalam pendekatan proses dapat diambil kesimpulan bahwa memang setiap kerjasama ada beberapa kekurangan dari beberapa indikatornya pelaksanaannya. Akan tetapi dengan kerjasama, *litoral states* dapat memenuhi kepentingan nasionalnya sebagai tujuan dan keuntungan bersama tanpa merusak nilai-nilai kedaulatan negara, seperti dalam asumsi-asumsi pokok teori neoliberal institusional. Sehingga, kerjasama keamanan MSP masih terbukti efektif dalam menekan angka kejahatan maritim yang terjadi di Selat Malaka, salah satunya tindak kejahatan pembajakan dan perampokan bersenjata terhadap kapal. Peraturan-peraturan yang tercantum dalam kerangka acuan (TOR) dan standar prosedur operasi (SOP) Malacca Strait Patrol (MSP) dinilai cukup detail dan sangat membantu dalam pelaksanaannya di lapangan, dalam MSSP atau patroli air, EIS atau patroli udara, dan IEG atau keterbukaan informasi. Meskipun masih ditemui hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya, akan tetapi bukanlah permasalahan yang signifikan dan masih dapat teratasi dengan memperkuat kerjasama.

Efektivitas kerjasama keamanan MSP dalam pendekatan sasaran atau *output* dapat diambil kesimpulan bahwa dapat dikatakan sudah berjalan efektif dari beberapa indikatornya, meskipun belum dapat dikatakan sempurna. Kerjasama keamanan MSP merupakan bukti nyata bahwa apabila *litoral states* saling berkerjasama dan membentuk sebuah rezim atau institusi internasional akan menghasilkan *absolute gains* dan menguntungkan semua pihak, seperti asumsi

pokok teori neo-liberal institusional. Data insiden pembajakan dan perampokan bersenjata di Selat Malaka pada tahun 2009-2014 menunjukkan penurunan dan tidak pernah terjadi insiden lebih dari dua kali. Sedangkan data perlintasan yang menunjukkan peningkatan hampir setiap tahunnya pada tahun 2009-2014, yang menggambarkan meningkatnya tingkat kepercayaan perusahaan kapal terhadap jalur perdagangan Selat Malaka. Hal ini didukung dengan dicabutnya status *black area* di Selat Malaka. *Output* tersebut merupakan *absolute gains* yang didapatkan dari kerjasama dan dampaknya lebih luas lagi bagi negara, seperti perdagangan, ekonomi, politik, keamanan, dan aspek-aspek lainnya.

Berdasarkan keseluruhan asumsi pokok teori neo-liberal institusional, maka diambil kesimpulan bahwa negara menjadi aktor yang sangat penting, dan tentunya dengan bantuan dari aktor *non-state*. Negara adalah aktor yang rasional. Negara akan bertindak sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Negara akan melakukan langkah-langkah yang dapat membantunya dalam mencapai kepentingannya. Tentunya melalui kelebihan yang didapati dari efektivitas kerjasama-kerjasama yang saling menguntungkan.

4.2 Saran

Penulis memberikan beberapa saran kedepan kepada pemerintah Indonesia dalam melaksanakan kerjasama keamanan Malacca Strait Patrol (MSP), yakni:

- a. Kerjasama keamanan MSP sebaiknya diperluas cakupan negara yang ikut serta dalam kerjasama keamanan ini. Penulis menyarankan untuk mengikut sertakan negara Myanmar sebagai negara anggota tetap dalam kerjasama keamanan ini, seperti halnya yang dilakukan terhadap negara

Thailand pada tahun 2008. Bergabungnya negara Myanmar dapat mempermudah akses *litoral states* lain dalam memperkuat keamanan di pintu masuk jalur perdagangan Selat Malaka, yakni perairan di bawah wilayah teritorial negara Myanmar

- b. Perlunya penambahan anggaran pertahanan untuk menambah asset-aset yang dimiliki TNI untuk menunjang menjaga keamanan Selat Malaka. Masih banyak *blindspot* yang tak terpantau oleh TNI AL dan radar. Selain itu 12 menara radar untuk memantau Selat Malaka tidak berfungsi 24 jam penuh dikarenakan keterbatasan kebutuhan energi.
- c. Perlunya pertukaran pelatihan pengembangan kapasitas dan *workshop* bersama untuk meningkatkan *skill* bagi seluruh personil patroli milik Indonesia ataupun *litoral states* lain.
- d. Perlunya inisiatif baru dalam kerjasama keamanan MSP untuk memaksimalkan menara-menara radar yang berada digaris pantai Selat Malaka yang berada di wilayah Indonesia, maupun penempatan menara radar baru yang berada di wilayah territorial *litoral states* lain, Malaysia-Singapura-Thailand.
- e. Mendorong pemerintah Indonesia untuk lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat di sepanjang garis pantai Selat Malaka yang berada di Pulau Sumatra dan Kepulauan Riau. Hal ini dikarenakan sebagian besar para pelaku pembajakan dan perampokan bersenjata yang berasal dari Indonesia dikarenakan alasan ekonomi. Hal ini menyebabkan

pembajak dan perampok bersenjata dianggap sebagai profesi bagi mereka.

- f. Mendorong instansi-instansi terkait yang berfokus dalam menjaga keamanan perairan Indonesia terhadap kejahatan maritim, seperti pembajakan dan perampokan bersenjata terhadap kapal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh kejahatan maritim tersebut. Dengan adanya kesadaran masyarakat dapat mempermudah pemerintah dalam menekan kejahatan maritime tersebut.
- g. Kerjasama keamanan MSP dapat dijadikan *role model* untuk kerjasama keamanan di wilayah lain, seperti di wilayah Laut Cina Selatan dan Laut Sulu.

Penulis merasa bahwa penelitian yang dilakukan penulis belum sempurna dalam memahami efektivitas kerjasama keamanan Malacca Strait Patrol (MSP) dalam mengatasi pembajakan dan perampokan bersenjata terhadap kapal di Selat Malaka. Oleh karena itu, penulis menyarankan kepada akademisi-akademisi yang ingin membuat penelitian lanjutan tentang topik ini dan mencari perspektif dari *litoral states* lain, tidak hanya terpaku terhadap perspektif Indonesia saja. Dengan adanya penelitian lanjutan diharapkan dapat lebih memahami efektivitas dalam suatu kerjasama keamanan, seperti di dalam kerjasama MSP yang dijalin oleh Indonesia-Malaysia-Singapura-Thailand.